



Tersedia online di
<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/risk>



Risk

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1990-2019

Lutfi Handayani¹, Sudjiono², Nunung Susilaningsih³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri

email: Lutfi_H@gmail.com¹, Sudjiono@unik-kediri.ac.id², Nunung_S@unik-kediri.ac.id³

Artikel History:

Artikel masuk 15-11-2021

Artikel revisi 15-11-2021

Artikel diterima 30-11-2021

Keywords: *Modal, lama usaha, jumlah tenaga kerja, pendapatan pengusaha.*

ABSTRAK

Jumlah penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1990-2019 terus meningkat setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh peningkatan kemiskinan sebesar 6,25% dalam jangka panjang. Jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan efek meningkatkan kemiskinan sebesar 0,19% dalam jangka panjang. Pengeluaran publik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, dengan dampak jangka panjang terhadap pengurangan kemiskinan sebesar 0,29%. Secara keseluruhan, jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penduduk dan pengangguran berdampak positif terhadap kemiskinan, sedangkan belanja publik berdampak negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

ABSTRACT

The population of Indonesia in the period 1990-2019 continues to grow every year. The results showed that the population has a positive and significant effect on poverty with the effect of increasing poverty by 6.25% in the long term. The number of unemployed has a positive and significant effect on poverty with the effect of increasing poverty by 0.19% in the long term. Government spending has a significant negative effect on poverty, with an effect on poverty alleviation of 0.29% in the long term. Taken together, population, unemployment and government spending have a significant influence on poverty in Indonesia. Population and unemployment have a positive effect on poverty, while government spending has a negative effect on poverty in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara dikatakan maju jika masyarakatnya hidup sejahtera dan sejahtera. Pemerintah Indonesia memandang pembangunan nasional sebagai salah satu upaya membangun masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Sesuai dengan tujuannya tersebut, beberapa kegiatan pembangunan difokuskan pada pembangunan daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Prioritas dan kebutuhan setiap daerah dengan akar dan tujuan pembangunan nasional ditentukan oleh pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, merupakan salah satu simbol kunci tercapainya pembangunan nasional tingkat pengentasan kemiskinan. Efektivitas dalam mengurangi kemiskinan adalah peningkatan utama dalam pilihan strategi dan alat pembangunan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu negara manapun di dunia ini. Kemiskinan bahkan telah menjadi masalah ekonomi fenomenal yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan negara dari waktu ke waktu, terutama di negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menyadari pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan berupaya semaksimal mungkin untuk menghapusnya dari agenda tahunan pemerintah juga akan menjadi strategi penting bagi rencana pembangunan jangka panjang untuk mendorong perekonomian dan menurunkan pemerintah. Ini juga akan menjadi rencana strategis untuk rencana pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat kemiskinan yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2019”.

TINJAUAN PUSTAKA

Tabel : Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Restu Ratri Astuti (2017)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004-2012	Jenis penelitian: Korelasional Variabel: 1. Penduduk miskin 2. Jumlah penduduk 3. Pertumbuhan ekonomi 4. Pendidikan kesehatan Alat analisis: Random Effect Model	Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan
2	Fathul Mufid Cholili (2018)	Analisis Pengaruh Pengangguran, (PDRB), dan (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)	Jenis penelitian: Deskriptif Kuantitatif Variabel independen: 1. Kemiskinan 2. Inflasi 3. Pengangguran Alat analisis: <i>Fixed Effect Model</i>	Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia
3	Pananrangi (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan	Jenis penelitian: Deskriptif Kuantitatif Variabel: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Kemiskinan Alat analisis: Regresi sederhana	Pertumbuhan ekonomi belum mampu digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor lain yang dianggap lebih dominan. Selain itu, investasi belum diarahkan pada sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sumber: Restu Ratri Astuti (2017), Fathul Mufid Cholili (2018), Pananrangi (2016), Cadra Mustika (2017), Seri Jefry Adil Waruwu (2016).

Landasan Teori

Pertumbuhan Penduduk

Definisi Pertumbuhan Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Sedangkan menurut Sajogyo (2015: 136) yang dimaksud dengan penduduk adalah “jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi”. Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad, 2014: 223) mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, ia melukiskan konsep hasil yang menurun (concept of diminishing return).

Malthus menjelaskan kecenderungan umum populasi suatu negara untuk tumbuh secara geometris, yaitu. menjadi dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu, pada saat yang sama, karena penurunan pendapatan dari faktor lahan, persediaan makanan hanya meningkat secara hitung. Karena pertumbuhan pasokan makanan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, pendapatan per kapita (dalam komunitas pertanian didefinisikan sebagai produksi makanan per kapita) akan cenderung turun ke tingkat yang sangat rendah, yang membuat populasi tidak pernah stabil, atau hanya di atas tingkat pasokan makanan. subsisten, yaitu pendapatan yang hanya dapat memenuhi kebutuhan subsisten.

Perekonomian dan Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi dan upaya membangun perekonomian. Karena penduduk sebagai Sumber Daya Manusia dapat menyediakan tenaga kerja atau tenaga ahli dalam menciptakan kegiatan ekonomi. “Salah satu masalah besar dalam pembangunan ekonomi di LDCs (*Less Development Countries*) adalah gejala pertumbuhan penduduk yang tinggi” (Hakim, 2014: 45).

Pertumbuhan penduduk yang cepat tampaknya meningkatkan kompleksitas upaya pembangunan di negara-negara berkembang. Karena, di satu sisi, pertumbuhan penduduk yang cepat akan meningkatkan jumlah pekerja dengan cepat, di sisi lain, negara-negara berkembang memiliki kapasitas yang sangat terbatas untuk menciptakan lapangan kerja baru. “Akibatnya timbul lah pengangguran yang sangat serius baik di kota maupun di desa dan masalah urbanisasi” (Suryana, 2013: 53).

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki permasalahan yang sama, yaitu memiliki jumlah penduduk yang besar yang tersebar di setiap wilayah. Sementara itu, wilayah usaha masih sangat terbatas sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran. Selain itu, masalah pendidikan belum terselesaikan. Tidak semua penduduk di seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan pendidikan yang baik karena keterbatasan dana. Jadi masih banyak orang dengan kualitas rendah. Akibatnya dapat menghambat kegiatan pembangunan yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan.

Seperti studi yang dilakukan oleh Suharto (2016: 45), “bahwa kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia diindikasikan oleh laju pengangguran yang masih relatif tinggi dan sulit/lambat penurunannya (*persistent*), dan juga oleh angka kemiskinan (terutama kemiskinan di kawasan pedesaan) yang juga relatif *persistent*”.

Pengertian Pengangguran

Menurut Sukirno (2014: 28) “pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya”. Pengangguran sering menjadi masalah dalam perekonomian, seiring dengan pengangguran, produktivitas masyarakat dan penurunan pendapatan, yang dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dari tahun ke tahun, pengangguran cenderung meningkat. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia, salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah kemampuan untuk meningkatkan kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini, persaingan tenaga kerja semakin ketat, terutama karena terbukanya perdagangan bebas, yang memudahkan masuknya tenaga kerja asing yang dianggap berkualitas ke dalam negeri.

Saat ini, upaya untuk mengurangi pengangguran adalah melalui rencana pembangunan ekonomi yang mencakup rencana ketenagakerjaan yang matang. Selain itu, dibarengi dengan kesadaran tenaga kerja yang lebih demokratis dalam hal hak memilih pekerjaan, kesempatan kerja, pekerjaan berbasis keterampilan dan kemauan tenaga kerja tanpa diskriminasi.

Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah jumlah pengeluaran Pemerintah digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. “Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut” (Gujarati, 2013: 65).

Pengeluaran pemerintah merupakan aspek penggunaan sumber daya yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Pengertian Kemiskinan

Ada banyak definisi dan konsep kemiskinan. Kemiskinan kini menjadi masalah multidimensi. Ini berarti bahwa kebutuhan manusia berbeda-beda, demikian pula kemiskinan. Dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan memiliki aspek utama berupa miskin dalam aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan. Aspek sekunder adalah miskin dalam jaringan sosial, sumber daya keuangan dan informasi. “Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk keuangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah” (Arsyad, 2014: 237). Tetapi lebih sering daripada tidak, kemiskinan adalah ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar di segala bidang kehidupan.

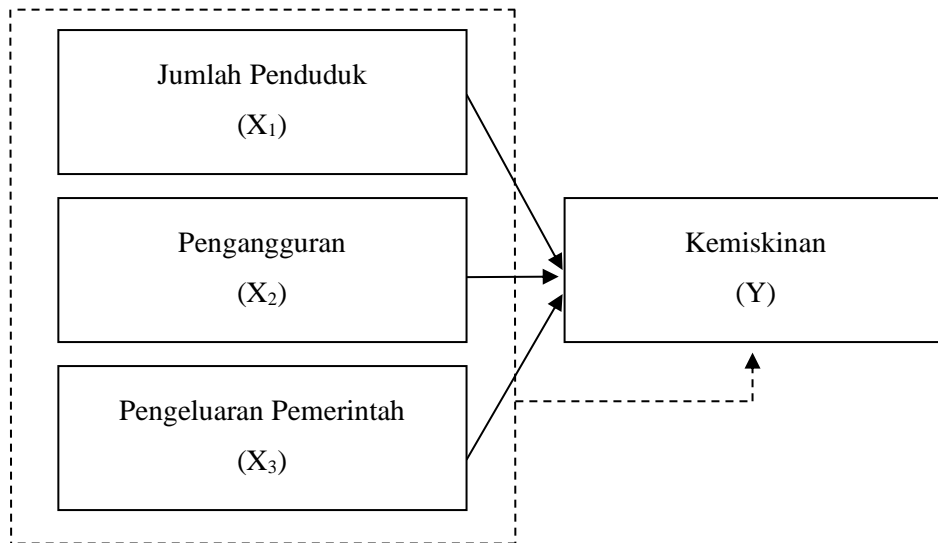
Pada tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak dapat menggunakan hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar meliputi: (1) persyaratan diet yang memadai; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air minum, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; (3) rasa aman dari ancaman perlakuan dan kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar dalam mengukur kemiskinan. Metode ini dihitung dengan menggunakan indeks kepegawaian, yaitu bagian penduduk miskin dari total penduduk. Jadi, dalam pandangan ini, Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan non-makanan yang diukur dengan pengeluaran.

Kemiskinan juga dapat diukur dengan membandingkan tingkat pengeluaran seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk pengeluaran bulanan. Saat ini, penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran bulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Kerangka Berpikir

Gambar : Kerangka Berpikir



Keterangan:

- > = pengaruh secara parsial
- - - - -> = pengaruh secara simultan

Sumber: Restu Ratri Astuti (2017), Fathul Mufid Cholili (2018), Pananrangi (2016), Cadra Mustika (2017), Seri Jefry Adil Waruwu (2016).

Hipotesis

- H1 : Jumlah penduduk (X₁) berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Y)
- H2 : Pengangguran (X₂) berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Y)
- H3 : Pengeluaran pemerintah (X₃) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y).
- H4 : Jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi

Populasi yang diambil oleh peneliti adalah aspek kependudukan, pengangguran dan pengeluaran masyarakat terhadap kemiskinan di Indonesia, dalam 30 tahun terakhir, sehingga populasi yang digunakan dalam penelitian ini dalam kurun waktu tahun 1990-2019.

Sampel

Sampel sebagai sekumpulan data yang diambil atau dipilih dari suatu populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia selama 30 tahun terakhir, dari tahun 1990 hingga 2019.

Metode Pengambilan Sampling

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling. Teknik ini digunakan oleh peneliti apabila di dalam populasi terdapat kelompok-kelompok yang tampak ada stratanya. (Sugiono, 2014: 59). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, yang mana dalam penelitian ini adalah aspek penduduk, pengangguran dan pengeluaran publik untuk kemiskinan di Indonesia, selama 30 tahun terakhir, yaitu dalam kurun waktu tahun 1990-2019.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Metode yang digunakan lebih dari sekedar model regresi. Modul ini menggunakan program Evievs 8 dengan metode Ordinary Least Squares (OLS).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari time series. Karena tipe datanya adalah time series dan pemodelannya menggunakan model OLS (Ordinary Least Squares), maka model regresinya adalah:

$$POVERTY_t = \beta_0 + \beta_1 JP_t + \beta_2 P_t + \beta_3 PP_t + e$$

Keterangan:

POVERTY = Kemiskinan

$\beta_2, \beta_3, \beta_1$ = Koefisien regresi variabel bebas

JP = Jumlah Penduduk

P = Pengangguran

PP = Pengeluaran Pemerintah

e = error.

Untuk menghitung persamaan regresi dengan menggunakan model OLS, data harus memenuhi asumsi dasar yaitu: uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.

Uji Asumsi Klasik

Sehubungan dengan penggunaan metode OLS, untuk menghasilkan nilai parameter model estimator yang lebih valid, maka model hipotesis klasik harus diuji. Uji hipotesis klasik yang digunakan adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi biasa atau tidak. Suatu model regresi dikatakan baik jika statis atau mendekati data yang terdistribusi. Itu selalu dapat diuji dengan cara yang berbeda, salah satunya adalah Jarque-Bera (tes OV). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas Jarque-Ber (JB) yang dihitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). “Apabila Probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila niainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual berdistribusi normal” (Sugiyono, 2016: 18).

b. Uji Linearitas

Uji linearitas merupakan analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear atau tidak (Sugiyono, 2016: 36). Jika nilai probabilitas hitung F lebih besar dari taraf alpha 0,05 (5%), maka model regresi memenuhi hipotesis linieritas dan sebaliknya jika nilai probabilitas hitung F lebih kecil dari 0,05 maka model tidak memenuhi linieritas hipotesis. . Nilai probabilitas hitung F dapat dilihat pada baris statistik F kolom Probabilitas.

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linear antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel-variabel independen yang terdapat dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas.

Multikorelasi dapat dilihat dari variance inflation factor (VIF). VIF mencoba melihat bagaimana varians estimator meningkat jika terdapat multikolinearitas dalam model empiris. “Jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi” (Sugiyono, 2016: 416-417).

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah gejala terjadinya hubungan antara variabel- variabel bebas atau berkorelasi sendiri. Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau tempat. “Menurut Hanke dan Reitsch dalam Sugiyono” (2016: 185), autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang

waktu berkaitan satu sama lain.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat confounding error pada periode t dengan error pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika ada korelasi, itu disebut masalah autokorelasi. Adanya gejala autokorelasi dalam regresi menyebabkan model yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan untuk nilai variabel dependen dari variabel independen tertentu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Pada umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data *time series*. Autokorelasi dapat dilihat dari hasil uji *Breusch-Godfrey* (BG) atau yang biasa dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier*. Uji BG adalah uji yang direkomendasikan untuk menguji autokorelasi dalam sebuah model. Kriteria untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi adalah apabila nilai probabilitas $Obs * R\text{-squared} > \alpha$ (5%), berarti tidak ada autokorelasi. Sebaliknya apabila nilai probabilitas $Obs * R\text{-squared} < \alpha$ (5%), berarti ada autokorelasi.

e. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan (variabel bebas) tidak memiliki nilai varian yang sama, sedangkan asumsi yang dipenuhi dalam regresi linear klasik adalah mempunyai nilai varian yang sama (konstan)/homoskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas akan muncul apabila variabel pengganggu memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lain. Jika varians tidak berubah maka disebut homokedastisitas dan jika tidak disebut heterokedastisitas (Sugiyono, 2016: 37). Adanya heteroskedastisitas menyebabkan estimasi koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien.

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari gejala heteroskedastisitas. Pengujian masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *White Heteroscedasticity Test*. Jika nilai probabilitas $Obs * R\text{-squared}$ lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Apabila nilai $prob F < \text{taraf signifikansi } 5\%$ dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengambilan keputusan berdasarkan apabila nilai $p\text{-value} < \text{taraf signifikansi } 5\%$ dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik atau seberapa besar sumbangannya terhadap variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). nilai R^2 berkisar antara nol sampai dengan satu. Semakin besar R^2 semakin baik modelnya. Nilai R^2 yang rendah berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti bahwa variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel terikat.

HASIL & PEMBAHASAN**Deskripsi Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder. Data diperoleh dari dokumen cetak maupun publikasi milik Bank Indonesia, BPS, dan World Bank. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan data kemiskinan, jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah periode tahun 1990-2019. Berikut akan disajikan deskripsi data dari setiap variabel yang diperoleh di lapangan.

Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1990-2019 dalam satuan jiwa. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan juga menempati urutan lima besar penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, mengikuti data jumlah penduduk Indonesia periode 1990-2019.

Pengangguran

Data pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pengangguran dalam satuan jiwa mulai tahun 1990-2019. Data tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kontribusi jumlah pengangguran terhadap kemiskinan. Pengangguran Indonesia dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Berikut data pengangguran Indonesia tahun 1990-2019.

Pengeluaran Pemerintah

Data pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah tahun 1990-2019 dalam US dollar. Data tersebut digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh anggaran dalam APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut data pengeluaran pemerintah Indonesia tahun 1990-2019.

Kemiskinan

Kemiskinan dalam penelitian ini digambarkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 1990-2019 dalam satuan jiwa. Pada Gambar 2 grafik kemiskinan di bawah ini menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk miskin antara tahun 1986 sampai dengan tahun 1994 mengalami penurunan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 1987 mengalami peningkatan.

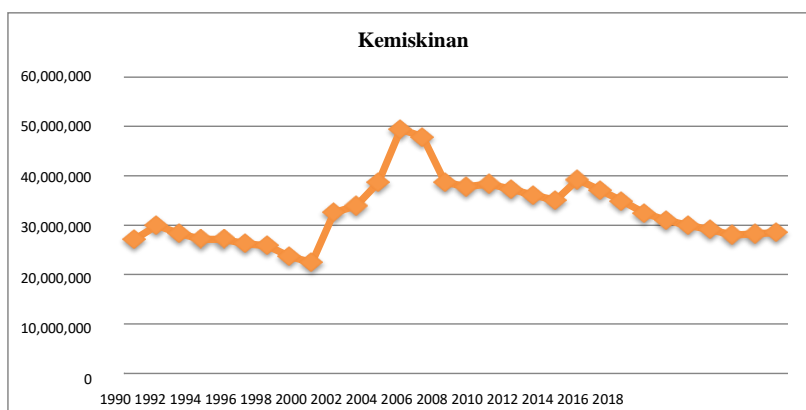
Hasil Penelitian

Deskripsi Variabel Penelitian

Kemiskinan

Kemiskinan dalam penelitian ini digambarkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 1990-2019 dalam satuan jiwa. Pada Gambar 2 grafik kemiskinan di bawah ini menunjukkan bahwa secara umum jumlah penduduk miskin antara tahun 1986 sampai dengan tahun 1994 mengalami penurunan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 1987 mengalami peningkatan

Gambar : Grafik Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Jiwa



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).

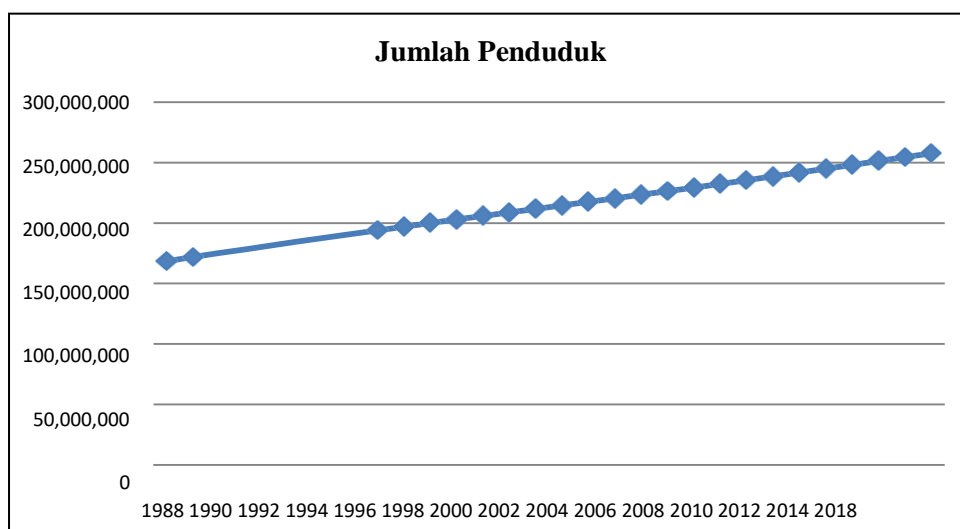
Berdasarkan Gambar 2 grafik kemiskinan di atas, peningkatan kemiskinan terjadi antara tahun 1996 sampai dengan tahun 1998. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut adalah karena krisis ekonomi global maupun krisis moneter yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, seperti serta harga bahan pokok pada waktu itu meningkat

tajam, yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat inflasi. kemudian. Banyak orang yang tergolong miskin, namun pendapatannya mendekati garis kemiskinan, berubah posisi menjadi miskin. Setelah tahun 1998 perekonomian Indonesia mulai membaik, pada tahun 1999 kemiskinan mulai menurun walaupun masih relatif tinggi, kemudian menurun hingga tahun 2005 dan 2006 angka kemiskinan kembali meningkat, setelah tahun 2006 angka kemiskinan di Indonesia menurun tahun demi tahun hal ini tidak lepas dari segala upaya dan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya terus bertambah setiap tahunnya.

Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1990-2019 dalam satuan jiwa. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan juga menempati urutan lima besar penduduk terbesar di dunia. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami kenaikan, berikut data jumlah penduduk Indonesia tahun 1990-2019.

Gambar : Grafik Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Jiwa

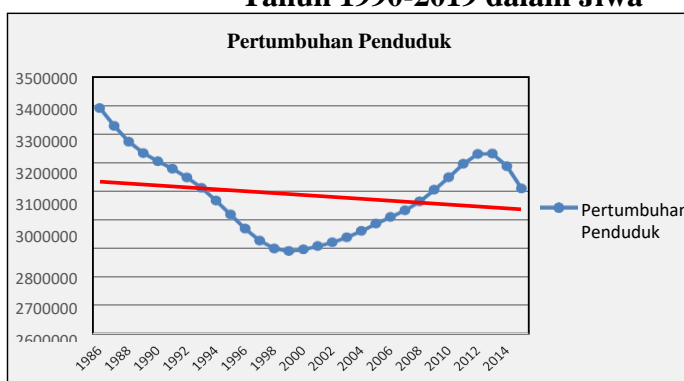


Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).

Terlihat pada Gambar 3 grafik jumlah penduduk, tahun 1986 jumlah penduduk 168,40 juta jiwa, kemudian 10 tahun kemudian tahun 1996 jumlah penduduk 199,92 juta jiwa, 10 tahun kemudian tahun 2006 jumlah penduduk 229,26 juta jiwa, lanjut Tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia adalah 257,56 juta. Dengan demikian, Indonesia menempati urutan ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.

Selain itu, meskipun Indonesia menempati urutan ke-4 dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia telah mengalami tren penurunan pertumbuhan penduduk selama tiga dekade terakhir. Hal ini terkait dengan penurunan tingkat kesuburan. Penurunan angka fertilitas ini merupakan dampak dari keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Program keluarga berencana diluncurkan pada tahun 1971. Awalnya program keluarga berencana hanya mencakup pulau Jawa dan Bali, baru pada tahun 1980-an program keluarga berencana mencakup semua provinsi. Oleh karena itu, pengaruh program KB dalam menurunkan angka fertilitas baru terlihat pada tahun 1980-an, begitu pula dengan penurunan pertumbuhan penduduk. Berikut ini adalah data pertumbuhan penduduk Indonesia periode 1990-2019.

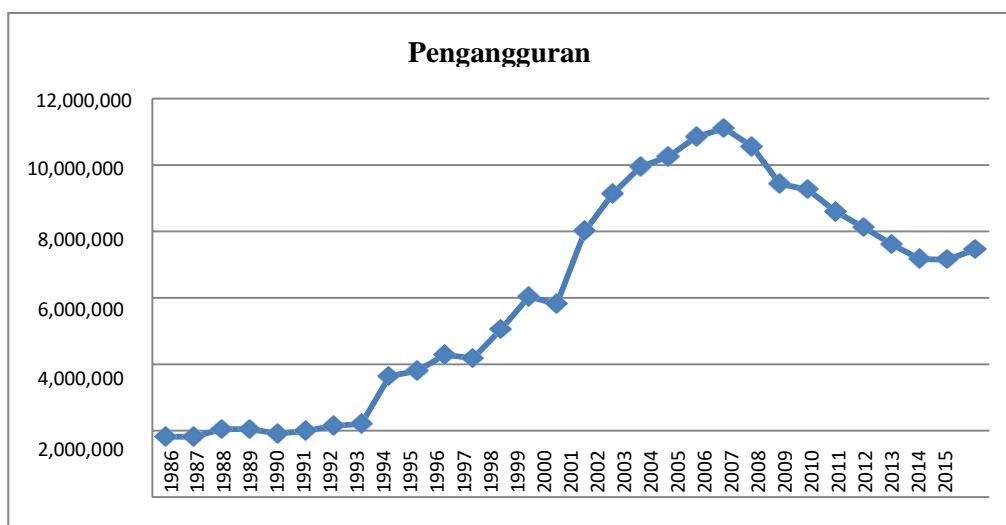
Gambar: Grafik Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Jiwa



Pengangguran

Data pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pengangguran dalam satuan jiwa mulai tahun 1990-2019. Data tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kontribusi jumlah pengangguran terhadap kemiskinan. Pengangguran Indonesia dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Berikut data pengangguran Indonesia tahun 1990-2019.

Gambar : Grafik Pengangguran Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Jiwa

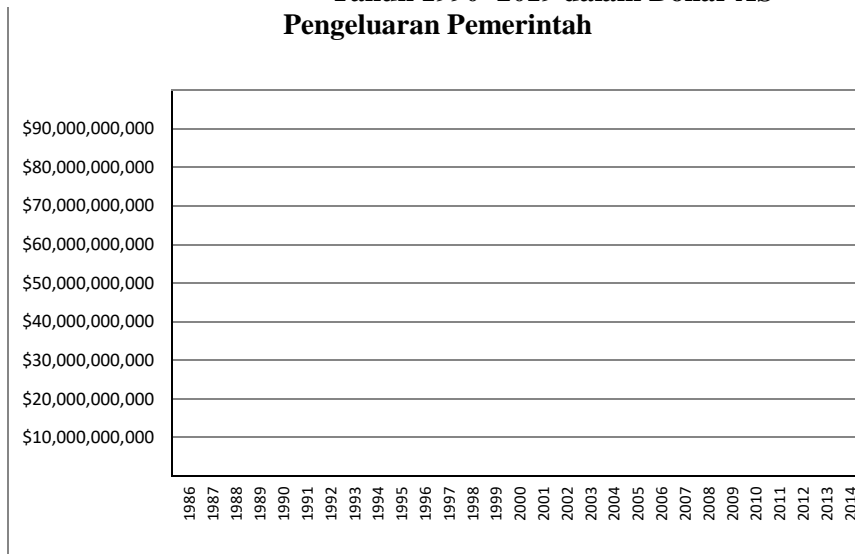


Terlihat pada gambar 5 grafik pengangguran bahwa pengangguran selalu ada perubahan baik kenaikan maupun penurunan. Namun, secara umum pengangguran mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun yang menciptakan tenaga kerja baru. Pengangguran timbul karena ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja.

Pengeluaran Pemerintah

Data pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah tahun 1990-2019 dalam US dollar. Data tersebut digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh anggaran dalam APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut data pengeluaran pemerintah Indonesia tahun 1990-2019.

Gambar : Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1990- 2019 dalam Dollar AS
Pengeluaran Pemerintah



Dari gambar di atas, grafik pengeluaran pemerintah Indonesia di atas, terlihat pada tahun 1998, bertepatan dengan reformasi setelah terjadinya krisis yang dialami Indonesia, pengeluaran pemerintah menurun drastis. Pos pengeluaran pemerintah terbesar pada tahun 1998 adalah bunga utang negara dan pos pengeluaran pemerintah terbesar setiap tahunnya semenjak 1997 adalah subsidi dan bunga utang negara. Berikut data pengeluaran pemerintah Indonesia tahun 1990-2019.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan estimasi data *time series* pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Untuk mengestimasi data *time series* peneliti menggunakan permodelan OLS (Ordinary Least Squares). Sebelum menggunakan OLS, harus dilakukan uji asumsi klasik.

Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera (JB Test) dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila prob. Jarque-Bera lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal, berikut ini adalah hasil uji normalitas:

Tabel : Uji Normalitas

<i>Tests for Normality</i>	
Skewness	-0.585459
Kurtosis	4.342494
Jarque-Bera	3.966676
Probability	0.137609

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2020).

Berdasarkan uji normalitas di atas, probabilitas sebesar 0,137609 menunjukkan bahwa prob. > 5%. Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

Uji Linearitas

Uji linieritas merupakan analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear atau tidak (Ali Muhson, 2015: 36). Apabila nilai Prob. Fhitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model regresi memenuhi asumsi linieritas dan sebaliknya, berikut ini adalah hasil uji linearitas:

Tabel : Uji Linearitas

<i>Ramsey RESET Test</i>		
	Value	Probability
t-statistic	0.777445	0.4442
F-statistic	0.604420	0.4442
Likelihood ratio	0.716675	0.3972

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2020).

Nilai kemungkinan. Fhitung dapat dilihat di antara statistik probabilitas kolom F. Dalam hal ini nilainya 0,4442 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi hipotesis linieritas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memverifikasi apakah model regresi memiliki korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel-variabel independen yang terdapat dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas. Dilihat oleh faktor varians inflasi (VIF) seharusnya variabel model yang baik tidak lebih besar dari 10, berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel : Uji Multikolinearitas

<i>Variance Inflation Factors</i>	
<i>Variable</i>	<i>Centered VIF</i>
JP	19.91928
LN_P	6.476631
LN_PP	8.516741

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2020).

Dari hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4 diperoleh hasil nilai VIF sebesar 19,91928 pada variabel bebas JP (Total Populasi). Jadi $VIF > 10$, terdapat multikolinearitas pada model ini. Untuk mengatasi hal tersebut, data diubah menjadi selisih. Setelah dilakukan transformasi data, variabel penelitian ini dianggap telah lolos uji multikolinearitas karena $VIF < 10$. Hasil uji multikolinearitas mengikuti setelah ditransformasikan ke dalam selisih.:

Tabel : Uji Multikolinearitas Difference

<i>Variance Inflation Factors</i>	
<i>Variable</i>	<i>Centered VIF</i>
D(JP)	1.160322
D(LN_P)	1.205339
D(LN_PP)	1.044920

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2020).

Uji Autokorelasi

Menurut Sugiyono (2016: 8), istilah autokorelasi diartikan sebagai korelasi diantara anggota seri dari observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (seperti pada data *time series*) atau tempat (seperti pada data *cross section*). Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antar variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau tempat. Untuk menguji autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Godfrey* (BG). Kreteria untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi adalah nilai Prob. *Obs* R-square lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%), sehingga H0 diterima yang berarti tidak terdapat autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Obs * R-square adalah Prob. kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.*

Tabel : Uji Autokorelasi

<i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:</i>			
F-statistic	3.273987	Prob. F(2,24)	0.0553
Obs*R-squared	6.430515	Prob. Chi-Square(2)	0.0401

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2020).

Dari hasil pengujian LM yang dilakukan, hasil yang diperoleh nilai Prob.Obs * R-square sebesar 0,0401. Karena masalah Note * R-square kurang dari level alpha (0,05), model

menunjukkan adanya autokorelasi. Untuk menyelesaikan masalah autokorelasi ini dapat digunakan metode *Difference* yaitu dengan cara men-*Difference*-kan seluruh variabel (Nachrowi, 2006: 23). Dengan menggunakan metode ini, hasil dari prob. Obs * R-square adalah 0,8296, yang lebih besar dari level alpha (0,05), sehingga model menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Tabel : Uji Autokorelasi *Difference*

<i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:</i>			
F-statistic	0.150073	Prob. F(2,23)	0.8615
Obs*R-squared	0.373570	Prob. Chi-Square(2)	0.8296

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2020).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual memiliki variansi yang konstan atau tidak. Model regresi yang baik harus homoskedastis (varian dari residualnya konstan). Residual memiliki variansi yang konstan atau tidak dapat dideteksi dengan uji heteroskedastisitas White, jika nilai probabilitas Obs*Rsquared lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil berikut diperoleh dengan menggunakan metode ini:

Tabel : Uji Heteroskedastisitas

<i>Heteroskedasticity Test: White</i>			
F-statistic	1.838488	Prob. F(9,20)	0.1231
Obs*R-squared	13.58251	Prob. Chi-Square(9)	0.1380

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2020).

Dari hasil White Test yang telah dilakukan didapatkan hasil nilai Prob Chi2 sebesar 0,1380. Karena nilai Prob lebih tinggi dari tingkat alpha (0,05), model tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Hasil Estimasi

Penelitian ini menggunakan estimasi data *time series* pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran masyarakat terhadap kemiskinan di Indonesia periode 1990-2019. Untuk mengestimasi data *time series* peneliti menggunakan pemodelan OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil Regresi OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai berikut:

Regresi OLS (*Ordinary Least Square*)

Model MCO dikembangkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil penilaiannya OLS (*Ordinary Least Square*) penduduk

Indonesia, pengangguran dan pengeluaran kemiskinan pemerintah.

Tabel : Hasil Estimasi OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JP	6.257149	3.040882	2.057676	0.0498
P	0.194924	0.071167	2.738965	0.0110
PP	-0.299375	0.060968	-4.910381	0.0000
C	20.05268	1.676617	11.96020	0.0000

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2020).

Dari hasil estimasi tersebut, dalam jangka panjang probabilitas untuk variabel JP (Jumlah Penduduk) sebesar 0,0498, P (Pengangguran) sebesar 0,0110, dan PP (Pengeluaran Pemerintah) sebesar 0,0000 signifikan pada taraf error 5%. Dari hasil estimasi dapat disimpulkan bahwa variabel kependudukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan ditunjukkan dengan nilai koefisien positif dan nilai probabilitas lebih rendah dari 0,05. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan ditunjukkan dengan nilai koefisien positif dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien negatif dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05.

Uji Statistik

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel : Hasil Uji Statistik F

Uji F Signifikansi Simultan	
R-squared	0.765824
Adjusted R-squared	0.738804
F-statistic	28.34252
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2020).

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, dengan menggunakan software Eviews 8 diperoleh nilai Fhitung sebesar 28,34252 dan probabilitas F sebesar 0,000000. Pada taraf signifikansi 5%, uji F signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Variabel populasi, pengangguran dan pengeluaran publik secara bersama-sama memiliki dampak yang signifikan terhadap munculnya kemiskinan.

b. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji ini dilakukan mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (penduduk, pengangguran dan pengeluaran masyarakat) terhadap variabel terikat (kemiskinan). Apabila nilai *p-value* < tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan

dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji parsial (Uji statistik t) dapat dilihat dari table 11 sebagai berikut:

Tabel : Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
JP	6.257149	2.057676	0.0498
P	0.194924	2.738965	0.0110
PP	-0.299375	-4.910381	0.0000
C	20.05268	11.96020	0.0000

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2020).

1) Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki t_{hitung} sebesar 2.057676 dan probabilitas sebesar 0.0498. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel jumlah penduduk secara individu signifikan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar 6.257149 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia

2) Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki t_{hitung} sebesar 2.738965 dan probabilitas sebesar 0.0110. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel pengangguran secara individu signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar 0.194924 menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia.

3) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat variabel pengeluaran publik t_{hitung} sebesar -4.910381 dan probabilitas sebesar 0,0000. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel pengeluaran pemerintah secara individu signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar -0.299375 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa baik ia dapat menjelaskan variasi variabel bebas atau seberapa besar kontribusinya terhadap variasi variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi atau goodness of fit pada tabel di atas adalah sebesar 0,765824. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 76,58% yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 76,58%, sedangkan sisanya sebesar 23,42% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Pembahasan

Analisis data *times series* pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1990-2019. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan regresi. Model dasar dari penelitian ini adalah:

$$POVERTY_t = \beta_0 + \beta_1 JPt + \beta_2 Pt + \beta_3 PPt + e$$

Kemudian untuk mengestimasi koefisien regresi, beberapa variabel ditransformasikan ke bentuk linier dengan menggunakan logaritma natural (Ln) ke dalam model sehingga diperoleh persamaan:

$$POVERTY_t = \beta_0 + \beta_1 JPt + \beta_2 \ln Pt + \beta_3 \ln PPt + e$$

Hasil estimasi koefisien variabel jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel : Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Prob.
JP	6.257149	0.0498
P	0.194924	0.0110
PP	-0.299375	0.0000
C	20.05268	0.0000

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2020).

Dari hasil pengolahan data *times series* dengan estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) pada tabel diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$POVERTY_t = 20,05268 + 6,257149 JPt + 0,194924 Pt - 0,299375 PPt + e$$

Keterangan:

- POVERTY = Kemiskinan
 β_0 = Konstanta/intersept
 β_3 = Koefisien regresi variabel bebas
 JP = Jumlah Penduduk
 P = Pengangguran
 PP = Pengeluaran Pemerintah
 e = *error*.

Dari hasil estimasi tabel tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien konstanta dalam jangka panjang sebesar 20,05268. Koefisien dari variabel- variabel tersebut secara akumulasi bernilai positif. Karena tidak masuk dalam model, angka-angka sistematis tersebut masuk

dalam konstanta, sehingga menyebabkan konstanta menjadi positif. Dengan bahasa lain apabila variabel bebas yaitu jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah bernilai “nol” maka kemiskinan sebesar 20.05%. Data ini menganalisis bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Jika dilihat dari nilai probabilitasnya, konstanta memiliki probabilitas dalam jangka panjang sebesar 0,0000, jumlah penduduk sebesar 0,0498, pengangguran sebesar 0,0110, dan pengeluaran pemerintah sebesar 0,0000 signifikan pada taraf 5% yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut mempengaruhi kemiskinan secara signifikan. Adapun variabel-variabel bebas dalam model yang mempengaruhi kemiskinan dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk

Berdasarkan persamaan regresi diperoleh hasil koefisien regresi populasi berarah positif sebesar 6,257149 dengan probabilitas 0,0498. Nilai signifikansi tersebut lebih rendah dari taraf signifikansi yang digunakan (0,05), yang berarti variabel kependudukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan periode 1990-2019 di Indonesia.

Besarnya koefisien positif sebesar 6,257149 menunjukkan bahwa peningkatan penduduk sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan kemiskinan sebesar 6,25%. Ada hubungan positif antara penduduk dan kemiskinan berarti pertumbuhan penduduk berdampak pada kemiskinan di Indonesia. Artinya jika jumlah penduduk Indonesia bertambah, dalam jangka panjang, dampak ini akan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, belanja publik berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Candra Mustika (2011) yang menyatakan bahwa penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. “Ada beberapa hal yang menjadikan penduduk sebagai penghambat pembangunan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan”. Menurut Todaro (2000: 236), pertumbuhan penduduk yang cepat merangsang masalah keterbelakangan dan semakin mengasingkan prospek pembangunan. Pertumbuhan penduduk tanpa memantau kemajuan penggerak pembangunan lainnya tidak akan meningkatkan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk secara efektif akan mengurangi tingkat upah juga menurunkan biaya produksi. Lebih lanjut, menurut Malthus, pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan merupakan elemen yang diperlukan untuk menopang permintaan tambahan, tetapi di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk yang besar dikhawatirkan akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, yang akan mempengaruhi perspektif kemiskinan. upaya pengurangan dan pembangunan.

Bertentangan dengan penelitian sebelumnya oleh Restu Ratri Astuti (2015) yang

menyatakan bahwa penduduk berdampak negatif terhadap kemiskinan. Ada beberapa hal yang mencegah penduduk dari pengaruh negatif terhadap kemiskinan, karena penduduk merupakan mesin pembangunan, karena penduduk yang lebih besar merupakan pasar potensial yang menjadi sumber permintaan berbagai jenis barang dan jasa, yang melakukan berbagai jenis barang dan jasa. kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi untuk kepentingan semua pihak, mengurangi biaya produksi dan menciptakan sumber suplai atau suplai tenaga kerja murah dalam jumlah banyak cukup yang pada gilirannya merangsang produksi atau agregasi Produksi yang lebih besar. Dan akhirnya, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang berarti tingkat kemiskinan akan menurun (Todaro dan Smith, 2016).

Pengangguran

Berdasarkan persamaan regresi diperoleh hasil koefisien regresi pengangguran berarah positif sebesar 0,1494924 dengan probabilitas 0,0110. Nilai signifikansi tersebut berada di bawah tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), yang berarti variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 1990-2019.

Nilai koefisien positif sebesar 0,1494924 menunjukkan bahwa peningkatan Pengangguran 1% akan diikuti oleh kemiskinan 0,19%. Adanya hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan berarti bertambah atau berkurangnya pengangguran di Indonesia mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Artinya, jika pengangguran di Indonesia meningkat, dalam jangka panjang, dampak ini akan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan dalam jangka panjang. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fathul Mufid Cholili (2014) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Pemilihan indikator pengangguran didasarkan pada kenyataan bahwa indikator tersebut berhubungan langsung dengan tingkat pendapatan. Setiap orang yang menganggur pasti tidak menghasilkan dari pekerjaan. Banyaknya dan beragamnya kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang mereka lakukan adalah bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan komunitas teratas jika kondisi full employment dapat tercapai, sebaliknya akan muncul pengangguran. Dampak negatif dari pengangguran adalah menurunkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga berdampak domino pada penurunan tingkat kesejahteraan. “Semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat, karena pengangguran tentunya akan memperbesar peluang untuk terjebak dalam kemiskinan dan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial” (Sukirno, 2010: 24).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2012), pengangguran tidak

berdampak pada kemiskinan. Pengangguran tidak berpengaruh karena tingginya tingkat pendapatan keluarga, sehingga mampu membiayai biaya hidup keluarga yang masih menganggur. Oleh karena itu, ia hanya akan mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan bidang dan tingkat pendapatan yang diinginkan, dan tidak akan mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang dan tingkat gaji yang direncanakan.

Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan persamaan regresi diperoleh hasil koefisien regresi belanja pemerintah dengan arah negatifnya adalah $-0,299375$ dengan probabilitas $0,0000$. Nilai signifikansi ini lebih rendah dari tingkat signifikansi yang digunakan ($0,05$), yang berarti variabel pengeluaran publik berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan periode 1990-2019 di Indonesia.

Nilai negatif $0,299375$ menunjukkan bahwa peningkatan belanja publik sebesar 1% akan diikuti dengan penurunan kemiskinan sebesar $0,29\%$. Adanya hubungan negatif antara belanja publik dan kemiskinan berarti bahwa kenaikan atau penurunan belanja publik di Indonesia mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Artinya jika belanja publik di Indonesia meningkat, dalam jangka panjang dampak ini akan menjadi faktor yang dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam jangka panjang, belanja publik berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Seri Jefri Adil Varuvu (2016), yang menyatakan bahwa belanja publik berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan berasal dari akumulasi berbagai masalah dan mencakup banyak dimensi kunci yang memerlukan intervensi pemerintah, yaitu adanya komponen belanja publik. Pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat investasi, kesempatan kerja, menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan pemerataan pendapatan (Amalia, 2015:183-189). Pada prinsipnya belanja pemerintah yang dituangkan dalam APBN dimaksudkan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Estomihija Hutabarata dan D. Srijona juga menyatakan bahwa belanja publik berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, salah satu program prioritas pemerintah daerah adalah pengentasan kemiskinan, sehingga tujuan desentralisasi adalah agar pemerintah dapat merespon lebih cepat, terutama untuk kebutuhan dasar masyarakat miskin. Sepulveda dan Vazkues (2010) menemukan bahwa pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan efek langsung dan tidak langsung dari kebijakan desentralisasi fiskal di mana

pemerintah daerah berperan penting melalui kebijakan terbuka dan belanja pemerintah langsung.

Menurut Dumairy (1996:158) pemerintah mengeluarkan banyak uang untuk membiayai kegiatannya. Pengeluaran tersebut tidak hanya untuk menggerakkan roda pemerintah sehari-hari, tetapi juga untuk membiayai kegiatan ekonomi. Ini tidak berarti bahwa pemerintah terlibat dalam bisnis, tetapi pemerintah harus berkontribusi menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum, termasuk pengentasan kemiskinan agar tidak semakin parah dan dapat dikurangi.

Menurut Noor (2015: 251), “kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang berlangsung di masyarakat”. Negara melalui pengeluaran pemerintah dapat memicu kegiatan ekonomi di masyarakat. Pengeluaran pemerintah idealnya tidak hanya kuantitas dan volume yang penting, tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah ketepatan penggunaannya. Hal ini mampu merangsang kegiatan ekonomi di masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Misalnya, ketika menyiapkan rencana pengeluaran/pengeluaran, perlu untuk mempertimbangkan dampak pengeluaran ini terhadap masyarakat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja negara/pemerintah berperan penting dalam mengurangi kemiskinan.

SIMPULAN & SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Jumlah penduduk Indonesia pada periode 1990-2019 terus bertambah setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh peningkatan kemiskinan sebesar 6,25% dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor pembangunan lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk secara efektif akan mengurangi upah dan juga menambah beban perekonomian. Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong keterbelakangan dan dikhawatirkan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga menghilangkan prospek pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

Jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan efek meningkatkan kemiskinan sebesar 0,19% dalam jangka panjang. Karena itu banyaknya dan beragamnya kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang mereka lakukan adalah bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai

puncaknya jika kondisi full employment dapat tercapai, sebaliknya akan muncul pengangguran. Dampak negatif dari pengangguran adalah menurunkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga berdampak domino pada penurunan tingkat kesejahteraan. Semakin rendah tingkat kemakmuran masyarakat, semakin besar kemungkinan pengangguran meningkatkan peluang untuk terjebak dalam kemiskinan.

Pengeluaran publik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, dengan efek jangka panjang terhadap pengurangan kemiskinan sebesar 0,29%. Hal ini karena belanja publik dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di masyarakat dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jabatan yang menggunakan anggaran besar, seperti beasiswa, bantuan medis, bantuan pendidikan, dan lain-lain, yang dianggap tidak produktif, juga turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara bersama-sama, jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penduduk dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh ketiga variabel bebas tersebut 76,58%, sedangkan sisanya 23,42% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis buat berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan penduduk berpengaruh pada peningkatan kemiskinan di Indonesia, sehingga diperlukan upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, misalnya dengan meningkatkan program keluarga berencana masyarakat. Apalagi pertumbuhan penduduk harus dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor pembangunan lain yang menunjang kualitas hidup masyarakat.

Banyaknya pengangguran berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan di Indonesia, sehingga perlu diciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi tenaga kerja agar kesejahteraan meningkat.

Dari hasil yang diperoleh yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia, seharusnya pemerintah berusaha meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah yang pro masyarakat, sehingga angka kemiskinan di Indonesia jelas turun sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan. pendapatan nasional dan pengurangan tingkat hutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Armildar, V. A. P. (2012). *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Study Kasus Pada PT. Bank Mega, Tbk. Cabang Makasar)*.
- Arwanda, R. (2019). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI INDEX SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PERIODE TAHUN 2013-2017 Skripsi. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- KURNIAWATI, M. (2019). *ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH Skripsi*.
- Monks, R. A. G., & Minnow, N. (2011). *Corporate governance manual*. 542. http://www.amazon.com/gp/product/B006NB8XCM?psc=1&redirect=true&ef_oh_aui_search_detailpage
- Nasrum, M. (2018). *Corporate Governance (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia)*. 1–162. <https://doi.org/10.31227/osf.io/zpfnx>
- Neneng Ravena. (2019). Pengaruh Implementasi GCG (Good Corporate Governance) terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Curup. *Ekonomi Syariah, 1*(4).
- Nofinawati. (2015). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review, 2*(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Oktaviani, A., & Rachmawati, L. (2019). Persepsi Nasabah tentang Kepatuhan Syariah dan Good Corporate Governance terhadap Loyalitas Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam, 2*(2), 162–169.
- Pangastuti, Ria Lestari, and Desi Kristanti. “Influence Organizational Citizenship Behavior and Work Motivation on Job Performance of PT JNE Kota Kediri.” *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, vol. 8, no. 1, 2021, pp. 48–60, doi:10.22225/jj.8.1.2786.48-60.
- Perdani, V. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012). *Skripsi*, 19–21. <http://www.jstor.org.libezp.utar.edu.my/stable/pdfplus/2527201.pdf>
- Purnamasari, I., & Darma, E. S. (2018). Pengaruh Implementasi Governance Terhadap Loyalitas Nasabah. *E-Jra, 07*(01), 32–45.
- Rumadan, R., Askandar, N. S., & Amin, M. (2018). Pengaruh Implementasi Syariah Governance terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Perbankan Syariah yang Terdaftar di Kota Malang). *E-Jra, 07*(09), 119–131.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Sukoco, Y. D. (2020). Penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Menggunakan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Perantara (Studi Empiris pada Perusahaan Keuangan Periode 2017-2018). *Jurnal Pengaruh Jumlah Penduduk*

Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, 03(02), 232–246.

Syukron, A. (2013). Good Corporate Governance di Bank Syariah. *Ekonomi Dan Hukum Islam, 3(1), 60–83.*

Tikawati, T. (2012). Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). *Mazahib - Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 10(2), 118–126.*

Vivi Adeyani, T. (2016). Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 11(1), 1–31.* www.pnm.co.id.